



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI

KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 29 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor ... Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017

- tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 15. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
 16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Negara Republik Tahun 2024 Nomor 779);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 7).
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2024, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 10).

21. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2024 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 102), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2024 semula sebesar Rp.1.377.580.500.544,00 bertambah sebesar Rp.258.879.922.637,00 sehingga menjadi Rp.1.636.460.423.181,00 dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| a. Pendapatan daerah | |
| a. Semula | Rp.1.287.390.122.660,00 |
| b. Bertambah | <u>Rp. 44.581.272.424,00</u> |
| Jumlah pendapatan daerah | Rp.1.331.971.395.084,00 |
| setelah perubahan | |
| b. Belanja Daerah | |
| a. Semula | Rp.1.377.580.500.544,00 |
| b. Bertambah | <u>Rp. 258.879.922.637,00</u> |
| Jumlah belanja daerah | Rp.1.636.460.423.181,00 |
| setelah perubahan | |

c. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

1) Semula	Rp. 90.190.377.884,00
2) Bertambah	<u>Rp. 214.298.650.213,00</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah Perubahan	Rp. 304.489.028.097,00

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah Perubahan	Rp. 0,00

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

a. Pendapatan daerah

1) Semula	Rp. 1.287.390.122.660,00
2) Bertambah	<u>Rp. 44.581.272.424,00</u>
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan, yang bersumber dari:	Rp. 1.331.971.395.084,00

a. Pendapatan Asli Daerah;

b. Pendapatan Transfer;

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

a. Pendapatan asli daerah

1. Semula	Rp. 55.062.649.660,00
2. Berkurang	<u>(Rp. 2.174.463.841,00)</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp. 52.888.185.819,00

b. Pajak daerah

1. Semula	Rp. 24.754.432.500,00
2. Bertambah	<u>Rp. 1.382.932.441,00</u>
Jumlah Pajak daerah setelah perubahan	Rp. 26.137.364.941,00

c. Retribusi daerah

1. Semula	Rp.	1.377.777.160,00
2. Bertambah	Rp.	<u>264.122.475,00</u>
Jumlah Retribusi daerah setelah perubahan	Rp.	1.641.899.635,00

d. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1. Semula	Rp.	1.600.000.000,00
2. Bertambah	Rp.	<u>119.452.030,00</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.	1.719.452.030,00

e. Lain-Lain PAD yang Sah

1. Semula	Rp.	27.330.440.000,00
2. Berkurang	(Rp.	<u>3.940.970.787,00)</u>
Jumlah Lain-Lain PAD yang Sah setelah perubahan	Rp.	23.389.469.213,00

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

a. Pajak daerah

1. Semula	Rp.	24.754.432.500,00
2. Bertambah	Rp.	<u>1.382.932.441,00</u>
Jumlah Pajak daerah setelah perubahan, yang bersumber dari:	Rp.	26.137.364.941,00

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Parkir;
7. Pajak Air Tanah;
8. Pajak Sarang Burung Walet;
9. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PPBPP2);
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

b. Pajak Hotel

1. Semula	Rp. 126.000.000,00
2. Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Pajak Hotel setelah perubahan	Rp. 126.000.000,00

c. Pajak Restoran

1. Semula	Rp. 1.422.500.000,00
2. Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Pajak Restoran setelah perubahan	Rp. 1.422.500.000,00

d. Pajak Hiburan

1. Semula	Rp. 5.250.000,00
2. Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Pajak Hiburan setelah perubahan	Rp. 5.250.000,00

e. Pajak Reklame

1. Semula	Rp. 190.000.000,00
2. Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Pajak Reklame setelah perubahan	Rp. 190.000.000,00

f. Pajak Penerangan Jalan

1. Semula	Rp. 8.509.032.500,00
2. Bertambah	<u>Rp. 1.382.932.441,00</u>
Jumlah Pajak Penerangan Jalan setelah perubahan	Rp. 9.891.964.941,00

g. Pajak Parkir

1. Semula	Rp. 60.000.000,00
2. Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Pajak Parkir setelah perubahan	Rp. 60.000.000,00

h. Pajak Air Tanah

1. Semula	Rp. 52.500.000,00
2. Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Pajak Air Tanah setelah perubahan	Rp. 52.500.000,00

i. Pajak Sarang Burung Walet

1. Semula	Rp.	25.000.000,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Sarang Burung Walet setelah perubahan	Rp.	25.000.000,00

j. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

1. Semula	Rp.	10.120.150.000,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Mineral Bukan Logam Dan Batuan setelah perubahan	Rp.	10.120.150.000,00

k. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)

1. Semula	Rp.	2.564.000.000,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) setelah perubahan	Rp.	2.564.000.000,00

1. Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

1. Semula	Rp.	1.680.000.000,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) setelah perubahan	Rp.	1.680.000.000,00

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

a. Retribusi daerah

1. Semula	Rp.	1.377.777.160,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>264.122.475,00</u>
Jumlah Retribusi daerah setelah perubahan, yang terdiri dari:	Rp.	1.641.899.635,00

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha;
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

b. Retribusi Jasa Umum

1. Semula	Rp.	815.000.000,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>183.913.035,00</u>
Jumlah Retribusi Jasa Umum Setelah Perubahan	Rp.	998.913.035,00

c. Retribusi Jasa Usaha

1. Semula	Rp.	245.000.000,00
2. Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Retribusi Jasa Usaha	Rp.	245.000.000,00
Setelah Perubahan		

d. Retribusi Perizinan Tertentu

1. Semula	Rp.	317.777.160,00
2. Bertambah	Rp.	<u>80.209.440,00</u>
Jumlah Retribusi Jasa Usaha	Rp.	397.986.600,00
Setelah Perubahan		

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

a. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1. Semula	Rp.	1.600.000.000,00
2. Bertambah	Rp.	<u>119.452.030,00</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan	Rp.	1.719.452.030,00

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan Yang terdiri dari Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan Modal pada BUMD.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

a. Lain-Lain PAD yang sah

1. Semula	Rp.	27.330.440.000,00
2. Berkurang	(Rp.	<u>3.940.970.787,00)</u>
Jumlah Lain-Lain PAD yang Sah	Rp.	23.389.469.213,00
setelah Perubahan		

b. Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan

1. Semula	Rp.	930.440.000,00
2. Berkurang	(Rp.	<u>630.440.000,00)</u>
Jumlah Hasil Penjualan BMD	Rp.	300.000.000,00
Yang tidak dipisahkan setelah Perubahan		

c. Jasa Giro

1. Semula	Rp.	2.400.000.000,00
2. Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Jasa Giro	Rp.	2.400.000.000,00
setelah Perubahan		

d. Pendapatan Bunga		
1. Semula	Rp.	4.000.000.000,00
2. Berkurang	(Rp.	<u>3.000.000.000,00)</u>
Jumlah Pendapatan Bunga setelah Perubahan	Rp.	1.000.000.000,00
e. Penerimaan atas Tuntutan ganti Kerugian Keuangan Daerah		
1. Semula	Rp.	2.700.000.000,00
2. Bertambah	Rp.	<u>2.300.000.000,00</u>
Jumlah Penerimaan atas Tuntutan ganti Keuangan Daerah setelah Perubahan	Rp.	5.000.000.000,00
f. Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk lain		
1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah	Rp.	<u>262.135.563,00</u>
Jumlah Penerimaan Komisi, Potongan dan Bentuk lain setelah Perubahan	Rp.	262.135.563,00
g. Pendapatan dari pengambilan		
1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah	Rp.	<u>27.333.650,00</u>
Jumlah Pendapatan dari Pengambilan setelah Perubahan	Rp.	27.333.650,00
h. Pendapatan BLUD		
1. Semula	Rp.	17.300.000.000,00
2. Berkurang	(Rp.	<u>2.900.000.000,00)</u>
Jumlah Pendapatan BLUD setelah Perubahan	Rp.	14.400.000.000,00

5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

a. Pendapatan transfer		
1. Semula	Rp.	1.217.794.122.000,00
2. Bertambah	Rp.	<u>44.872.980.265,00</u>
Jumlah Pendapatan transfer Pusat setelah perubahan, yang terdiri dari:	Rp.	1.262.667.102.265,00

b. Transfer pemerintah pusat

1. Semula	Rp.1.141.294.122.000,00
2. Bertambah	<u>Rp. 14.147.176.000,00</u>
Jumlah transfer pemerintah Pusat setelah perubahan	Rp. 1.155.441.298.000,00

c. Transfer antar daerah

1. Semula	Rp. 76.500.000.000,00
2. Bertambah	<u>Rp. 30.725.804.265,00</u>
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp.107.225.804.265,00

6. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b yang terdiri dari:

a. Dana Perimbangan

1. Semula	Rp.1.080.345.733.000,00
2. Berkurang	<u>(Rp. 1.224.295.000,00)</u>
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan	Rp. 1.079.121.438.000,00

b. Dana desa

1. Semula	Rp. 60.948.389.000,00
2. Bertambah	<u>Rp. 2.408.055.000,00</u>
Jumlah Dana Desa	Rp. 63.356.444.000,00

7. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Pendapatan Transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b sebagai berikut:

a. Pendapatan Transfer antar daerah

1. Semula	Rp. 76.500.000.000,00
2. Bertambah	<u>Rp. 30.725.804.265,00</u>
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah setelah perubahan	Rp. 107.225.804.265,00

b. Pendapatan Bagi Hasil

1. Semula	Rp.	76.500.000.000,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>5.725.804.265,00</u>
Jumlah Pendapatan Bagi Hasil setelah perubahan	Rp.	82.225.804.265,00

c. Bantuan Keuangan

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>25.000.000.000,00</u>
Jumlah Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp.	25.000.000.000,00

8. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

a. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

1. Semula	Rp	14.533.351.000,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>1.882.756.000,00</u>
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah setelah Perubahan, yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Rp.	16.416.107.000,00

9. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp.1.377.580.500.544,00 bertambah sebesar Rp.258.879.922.637,00 menjadi sebesar Rp.1.636.460.423.181,00 yang terdiri dari:

- a. Belanja Operasional;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

10. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a sebagai berikut:

a. Belanja operasi;

1) Semula	Rp. 940.216.812.621,00
2) Bertambah	<u>Rp. 87.770.496.879,00</u>
Jumlah belanja operasi	Rp. 1.027.987.309.500,00
setelah perubahan, yang terdiri dari:	

b. Belanja pegawai

1) Semula	Rp. 382.648.927.664,00
2) Berkurang	<u>(Rp. 19.340.237.704,36)</u>
Jumlah belanja pegawai	Rp. 363.308.689.959,64
setelah perubahan	

c. Belanja barang dan jasa

1) Semula	Rp. 513.588.984.813,00
2) Bertambah	<u>Rp. 107.800.055.543,36</u>
Jumlah belanja barang	Rp. 621.389.040.356,36
dan jasa setelah perubahan	

d. Belanja subsidi

1) Semula	Rp. 400.000.000,00
2) berkurang	<u>(Rp. 400.000.000,00)</u>
Jumlah belanja subsidi	Rp. 0,00
setelah perubahan	

e. Belanja hibah

1) Semula	Rp. 35.231.900.144,00
2) Berkurang	<u>(Rp. 589.320.960,00)</u>
Jumlah belanja hibah	Rp. 34.642.579.184,00
setelah perubahan	

f. Belanja bantuan sosial

1) Semula	Rp. 8.347.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 300.000.000,00</u>
Jumlah belanja bantuan	Rp. 8.647.000.000,00
sosial setelah perubahan	

11. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp. 382.648.927.664,00
2) Berkurang	<u>(Rp. 19.340.237.704,36)</u>
Jumlah belanja Pegawai setelah perubahan	Rp. 363.308.689.959,64

b. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

1) Semula	Rp. 242.799.737.782,00
2) Berkurang	<u>(Rp. 21.148.063.629,36)</u>
Jumlah belanja Gaji dan Tunjangan ASN setelah perubahan	Rp. 221.651.674.152,64

c. Belanja Tambahan Penghasilan ASN

1) Semula	Rp. 84.665.690.882,00
2) Berkurang	<u>(Rp. 4.306.911.081,00)</u>
Jumlah belanja Penghasilan ASN setelah perubahan	Rp. 80.358.779.801,00

d. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan Objektif lainnya ASN

1) Semula	Rp. 29.157.620.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 5.963.707.000,00</u>
Jumlah belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan Objektif lainnya ASN setelah perubahan	Rp. 35.121.327.000,00

e. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

1) Semula	Rp. 12.799.034.000,00
2) Berkurang	<u>(Rp. 1.393.969.994,00)</u>
Jumlah belanja Gaji dan Tunjangan DPRD setelah perubahan	Rp. 11.405.064.006,00

f. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

1) Semula	Rp. 180.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH setelah perubahan	Rp. 180.000.000,00

g. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

1) Semula Rp. 936.845.000,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah belanja Penerimaan Rp. 936.845.000,00

Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH setelah perubahan

h. Belanja Gaji dan Tunjangan MRP

1) Semula Rp. 3.910.000.000,00

2) Berkurang (Rp. 185.000.000,00)

Jumlah belanja Gaji dan Rp. 3.725.000.000,00

Tunjangan MRP setelah perubahan

i. Belanja Pegawai BLUD

1) Semula Rp. 8.200.000.000,00

2) Bertambah Rp. 1.730.000.000,00

Jumlah belanja Pegawai Rp. 9.930.000.000,00

BLUD setelah perubahan

12. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

a. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula Rp. 513.588.984.813,00

2) Bertambah Rp. 107.800.055.543,36

Jumlah belanja Barang Rp. 621.389.040.356,36

Dan Jasa setelah perubahan

b. Belanja Barang

1) Semula Rp. 176.520.491.250,00

2) Bertambah Rp. 59.759.074.799,36

Jumlah belanja Barang Rp. 236.279.566.049,36

setelah perubahan

c. Belanja Jasa	
1) Semula	Rp. 193.269.034.984,00
2) Bertambah	<u>Rp. 9.874.885.761,00</u>
Jumlah belanja Jasa setelah perubahan	Rp. 203.143.920.745,00
d. Belanja Pemeliharaan	
1) Semula	Rp. 14.645.837.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 6.636.427.850,00</u>
Jumlah belanja Pemeliharaan setelah perubahan	Rp. 21.282.264.850,00
e. Belanja Perjalanan Dinas	
1) Semula	Rp. 77.445.946.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 28.683.351.100,00</u>
Jumlah belanja Perjalanan Dinas setelah perubahan	Rp. 106.129.297.100,00
f. Belanja Uang dan / Jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga / pihak lain / masyarakat	
1) Semula	Rp. 2.581.880.000,00
2) Berkurang	<u>(Rp. 7.834.568,00)</u>
Jumlah belanja Uang dan / Jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga / pihak lain / masyarakat setelah perubahan	Rp. 2.574.045.432,00
g. Belanja Barang dan Jasa BOS	
1) Semula	Rp. 40.535.795.579,00
2) Bertambah	<u>Rp. 216.864.350,00</u>
Jumlah belanja Barang dan Jasa BOS setelah perubahan	Rp. 40.752.659.929,00
h. Belanja Barang dan Jasa BLUD	
1) Semula	Rp. 8.590.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 2.637.286.251,00</u>
Jumlah belanja Barang Dan Jasa BLUD setelah perubahan	Rp. 11.227.286.251,00

13. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

a. Belanja Subsidi

1) Semula	Rp.	400.000.000,00
2) Berkurang	(Rp.	<u>400.000.000,00</u>)
Jumlah belanja Subsidi	Rp.	0,00
setelah perubahan, yang terdiri dari		
Belanja Subsidi kepada BUMD		

14. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

a. Belanja Hibah

1) Semula	Rp.	35.231.900.144,00
2) Berkurang	(Rp.	<u>589.320.960,00</u>)
Jumlah belanja Hibah	Rp.	34.642.579.184,00
setelah perubahan		

b. Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang berbadan Hukum Indonesia

1) Semula	Rp.	34.876.886.000,00
2) Berkurang	(Rp.	<u>1.000.000.000,00</u>)
Jumlah belanja Hibah Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat	Rp.	33.876.886.000,00
yang berbadan Hukum setelah perubahan		

c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik

1) Semula	Rp.	355.014.144,00
2) Bertambah	Rp.	<u>10.679.040,00</u>
Jumlah belanja Hibah	Rp.	365.693.184,00
Bantuan Keuangan Partai Politik setelah perubahan		

d. Belanja Hibah Dana BOSP

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	Rp.	<u>400.000.000,00</u>
Jumlah belanja Hibah Dana BOSP	Rp.	400.000.000,00
setelah perubahan		

15. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

1. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	Rp. 8.347.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 300.000.000,00</u>
Jumlah belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp. 8.647.000.000,00

2. Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu

1) Semula	Rp. 1.627.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah belanja Bantuan Sosial Kepada individu setelah perubahan	Rp. 1.627.000.000,00

3. Belanja Bantuan Sosial kepada keluarga

1) Semula	Rp. 600.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 300.000.000,00</u>
Jumlah belanja Bantuan Sosial Kepada keluarga setelah perubahan	Rp. 900.000.000,00

4. Belanja Bantuan Sosial kepada kelompok masyarakat

1) Semula	Rp. 6.120.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah belanja Bantuan Sosial Kepada kelompok masyarakat setelah perubahan	Rp. 6.120.000.000,00

16. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b sebagai berikut:

a. Belanja modal;

1) Semula	Rp. 270.032.453.657,00
2) Bertambah	<u>Rp. 168.039.772.196,00</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan, yang terdiri dari:	Rp. 438.072.225.853,00

b. Belanja modal tanah

1) Semula	Rp. 5.250.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 124.104.999,00</u>
Jumlah belanja modal	Rp. 5.374.104.999,00
Tanah setelah perubahan	

c. Belanja modal peralatan dan mesin

1) Semula	Rp. 33.105.184.634,00
2) Bertambah	<u>Rp. 19.480.126.050,00</u>
Jumlah belanja modal	Rp. 52.585.310.684,00
peralatan dan mesin setelah perubahan	

d. Belanja modal bangunan dan gedung

1) Semula	Rp. 96.247.799.606,00
2) bertambah	<u>Rp. 41.128.349.544,00</u>
Jumlah belanja modal	Rp. 137.376.149.150,00
Bangunan dan gedung setelah perubahan	

e. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi

1) Semula	Rp. 119.005.533.830,00
2) Bertambah	<u>Rp. 105.089.841.603,00</u>
Jumlah belanja modal	Rp. 224.095.375.433,00
jalan, irigasi, jaringan dan irigasi setelah perubahan	

f. Belanja modal aset tetap lainnya

1) Semula	Rp. 15.898.935.587,00
2) Bertambah	<u>Rp. 198.950.000,00</u>
Jumlah belanja modal asset	Rp. 16.097.885.587,00
tetap lainnya setelah perubahan	

g. Belanja modal aset lainnya

1) Semula	Rp. 525.000.000,00
2) bertambah	<u>Rp. 2.018.400.000,00</u>
Jumlah belanja modal asset	Rp. 2.543.400.000,00
lainnya setelah perubahan	

17. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b sebagai berikut:

a. Belanja modal peralatan dan mesin

1) Semula Rp. 33.105.184.634,00

2) bertambah Rp. 19.480.126.050,00

Jumlah belanja modal peralatan Rp. 52.585.310.684,00

Dan mesin setelah perubahan

b. Belanja modal alat besar

1) Semula Rp. 647.180.000,00

2) bertambah Rp. 2.042.440.000,00

Jumlah belanja modal alat besar Rp. 2.689.620.000,00

setelah perubahan

c. Belanja modal alat angkutan

1) Semula Rp. 5.554.082.000,00

2) bertambah Rp. 47.153.000,00

Jumlah belanja modal alat Rp. 5.601.235.000,00

Angkutan setelah perubahan

d. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur

1) Semula Rp. 36.234.000,00

2) bertambah Rp. 12.459.000,00

Jumlah belanja modal alat Rp. 48.693.000,00

Bengkel dan alat ukur setelah perubahan

e. Belanja modal kantor dan rumah tangga

1) Semula Rp. 15.557.884.000,00

2) bertambah Rp. 9.330.487.000,00

Jumlah belanja modal alat kantor Rp. 24.888.371.000,00

Dan rumah tangga setelah perubahan

f. Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar

1) Semula Rp. 2.242.078.000,00

2) bertambah Rp. 873.587.500,00

Jumlah belanja modal alat studio, Rp. 3.115.665.500,00

komunikasi dan pemancar setelah perubahan

g. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan

1) Semula	Rp.	582.078.800,00
2) bertambah	<u>Rp.</u>	<u>232.000.000,00</u>
Jumlah belanja modal alat	Rp.	814.078.800,00

Kedokteran dan kesehatan setelah perubahan

h. Belanja modal alat laboratorium

1) Semula	Rp.	0,00
2) bertambah	<u>Rp.</u>	<u>100.000.000,00</u>
Jumlah belanja modal alat	Rp.	100.000.000,00

laboratorium setelah perubahan

i. Belanja modal Komputer

1) Semula	Rp.	4.293.274.000,00
2) bertambah	<u>Rp.</u>	<u>6.633.273.000,00</u>
Jumlah belanja modal Komputer	Rp.	10.926.547.000,00

setelah perubahan

j. Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian

1) Semula	Rp.	350.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>12.986.550,00</u>
Jumlah belanja modal alat	Rp.	362.986.550,00

Produksi, pengolahan dan permurnian setelah perubahan

k. Belanja modal alat Keselamatan Kerja

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>1.000.000,00</u>
Jumlah belanja modal alat	Rp.	1.000.000,00

Keselamatan Kerja setelah perubahan

l. Belanja modal Peralatan Olahraga

1) Semula	Rp.	5.260.000,00
2) Berkurang	<u>(Rp.)</u>	<u>5.260.000,00</u>
Jumlah belanja modal alat	Rp.	0,00

Keselamatan Kerja setelah perubahan

m. Belanja modal Peralatan dan Mesin BOS

1) Semula	Rp.	3.437.113.834,00
2) bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah belanja modal Peralatan	Rp.	3.437.113.834,00

Dan Mesin BOS setelah perubahan

n. Belanja modal Peralatan dan Mesin BLUD

1) Semula	Rp.	400.000.000,00
2) bertambah	<u>Rp.</u>	<u>200.000.000,00</u>
Jumlah belanja modal peralatan	Rp.	600.000.000,00
Dan Mesin BLUD setelah perubahan		

18. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d sebagai berikut:

a. Belanja modal gedung dan bangunan;

1) Semula	Rp.	96.247.799.606,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>41.128.349.544,00</u>
Jumlah belanja modal gedung	Rp.	137.376.149.150,00
Dan bangunan setelah perubahan, yang terdiri dari:		

b. Belanja modal bangunan gedung;

1) Semula	Rp.	91.267.299.606,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>38.041.490.944,00</u>
Jumlah belanja modal	Rp.	129.308.790.550,00
Bangunan gedung setelah perubahan		

c. Belanja modal monumen;

1) Semula	Rp.	10.500.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah belanja modal	Rp.	10.500.000,00
Monumen setelah perubahan		

d. Belanja modal tugu titik kontrol/pasti;

1) Semula	Rp.	4.870.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>3.174.858.600,00</u>
Jumlah belanja modal tugu	Rp.	8.044.858.600,00
Kontrol / pasti setelah perubahan		

e. Belanja modal gedung dan bangunan BLUD;

1) Semula	Rp.	100.000.000,00
2) Berkurang	(Rp.	<u>88.000.000,00</u>)
Jumlah belanja modal gedung	Rp.	12.000.000,00
Dan bangunan BLUD setelah perubahan		

19. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Anggaran belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e sebagai berikut:

a. Belanja modal jalan, jaringan, irigasi;

1) Semula	Rp.	119.005.533.830,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>105.089.841.603,00</u>
Jumlah belanja modal jalan,	Rp.	224.095.375.433,00
Jaringan, irigasi setelah perubahan		

b. Belanja modal jalan dan jembatan;

1) Semula	Rp.	84.478.033.830,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>91.015.531.639,00</u>
Jumlah belanja modal jalan dan	Rp.	175.493.565.469,00
Dan Jembatan setelah perubahan		

c. Belanja modal bangunan air;

1) Semula	Rp.	13.801.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>8.438.468.714,00</u>
Jumlah belanja modal bangunan	Rp.	22.239.468.714,00
Air setelah perubahan		

d. Belanja modal instalasi ;

1) Semula	Rp.	650.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>920.000.000,00</u>
Jumlah belanja modal instalasi,	Rp.	1.570.000.000,00
setelah perubahan		

e. Belanja modal jaringan;

1) Semula	Rp. 20.076.500.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 4.715.841.250,00</u>
Jumlah belanja modal Jaringan	Rp. 24.792.341.250,00
setelah perubahan	

20. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Anggaran belanja Aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f sebagai berikut:

a. Belanja modal aset tetap lainnya;

1. Semula	Rp. 15.898.935.587,00
2. Bertambah	<u>Rp. 198.950.000,00</u>
Jumlah belanja aset tetap lainnya	Rp. 16.097.885.587,00
setelah perubahan, yang bersumber dari:	

b. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;

1. Semula	Rp. 13.973.355.000,00
2. Bertambah	<u>Rp. 198.950.000,00</u>
Jumlah belanja Modal Bahan	Rp. 14.172.305.000,00
Perpustakaan setelah perubahan	

c. Belanja Modal Aset tetap Lainnya BOS;

1. Semula	Rp. 1.925.580.587,00
2. Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah belanja Modal Aset	Rp. 1.925.580.587,00
Lainnya setelah perubahan	

21. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Anggaran belanja Modal Aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf g sebagai berikut:

a. Belanja Modal aset lainnya

1. Semula	Rp. 525.000.000,00
2. Bertambah	<u>Rp. 2.018.400.000,00</u>
Jumlah belanja Modal aset	Rp. 2.543.400.000,00

lainnya setelah perubahan

b. Belanja aset lainnya – aset tidak berwujud

1. Semula	Rp.	515.000.000,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>2.026.400.000,00</u>
Jumlah belanja aset lainnya	Rp.	2.541.400.000,00

Aset tidak berwujud setelah perubahan

c. Belanja aset lainnya BLUD;

1. Semula	Rp.	10.000.000,00
2. Berkurang	<u>(Rp.)</u>	<u>8.000.000,00</u>
Jumlah belanja aset lainnya	Rp.	2.000.000,00

BLUD setelah perubahan

22. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

a. Belanja tidak terduga;

1. Semula	Rp.	5.500.000.000,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah belanja tidak terduga	Rp.	5.500.000.000,00

setelah perubahan

23. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d sebagai berikut:

a. Belanja transfer;

1. Semula	Rp.	161.831.234.266,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>3.069.653.562,00</u>
Jumlah belanja transfer	Rp.	164.900.887.828,00

setelah perubahan, yang terdiri dari:

b. Belanja Bagi Hasil;

1. Semula	Rp.	2.648.264.966,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>1.383.633.562,00</u>
Jumlah belanja Bagi Hasil	Rp.	4.031.898.528,00

setelah perubahan

c. Belanja Bantuan Keuangan;

1. Semula	Rp. 159.182.969.300,00
2. Bertambah	<u>Rp. 1.686.020.000,00</u>
Jumlah belanja Bantuan	Rp. 160.868.989.300,00
Keuangan setelah perubahan	

24. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Anggaran belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota dan desa ;

1. Semula	Rp. 2.648.264.966,00
2. Bertambah	<u>Rp. 1.383.633.562,00</u>
Jumlah belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota	Rp. 4.031.898.528,00

25. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Anggaran belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas:

a. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten / kota Kepada Desa;

1. Semula	Rp. 159.182.969.300,00
2. Bertambah	<u>Rp. 1.686.020.000,00</u>
Jumlah belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten / kota Kepada Desa setelah perubahan	Rp. 160.868.989.300,00

26. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.90.190.377.884,00,- bertambah sebesar Rp.214.298.650.213,00,- sehingga menjadi Rp.304.489.028.097,00,- yang terdiri dari:

- a. Penerimaan Pembiayaan
- b. Pengeluaran Pembiayaan

27. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a sebagai berikut:

a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan ;

- 1) Semula Rp. 90.190.377.884,00
- 2) Bertambah Rp. 214.298.650.213,00

Anggaran Penerimaan Pembiayaan Rp. 304.489.028.097,00

Setelah Perubahan, Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya

28. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

a. Sisa Lebih Tahun Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya;

- 1. Semula Rp. 90.190.377.884,00
- 2. Bertambah Rp. 214.298.650.213,00

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Rp. 304.489.028.097,00

Tahun Sebelumnya Setelah Perubahan, terdiri atas:

b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer;

- 1. Semula Rp. 0,00
- 2. Bertambah Rp. 167.152.651.000,00

Jumlah Pelampauan Pendapatan Rp. 167.152.651.000,00

Transfer Setelah Perubahan

c. Penghematan Belanja;

- 1. Semula Rp. 70.190.377.884,00
- 2. Bertambah Rp. 70.190.377.884,00

Jumlah Penghematan Belanja Rp. 0,00

Setelah Perubahan

d. Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan;

1. Semula Rp. 20.000.000.000,00

2. Bertambah Rp. 109.346.500.333,00

Jumlah sisa dana akibat tidak Rp. 129.346.500.333,00

Tercapainya capaian target kinerja

dan sisa dana pengeluaran pembiayaan Setelah Perubahan

e. Sisa Belanja Lainnya:

1. Semula Rp. 0,00

2. Bertambah Rp. 7.989.876.764,00

Jumlah sisa belanja lainnya Rp. 7.989.876.764,00

Setelah Perubahan

29. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b sebesar Rp. 0 (Nol rupiah)

30. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

a. Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar (Rp.90.190.377.884,00),- bertambah sebesar (Rp.214.298.650.213,00),- sehingga menjadi (Rp.304.489.028.097,00),-

b. Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.90.190.377.884,00,- bertambah sebesar Rp.214.298.650.213,00,- sehingga menjadi sebesar Rp.304.489.028.097,00,-

31. Ketentuan pada bagian lampiran diubah, sehingga lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati Ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Talang Ubi

Pada tanggal 27 SEPTEMBER 2024

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG IIR,

dto

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi

Pada tanggal, 27 SEPTEMBER 2024

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

KARTIKA YANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2024 NOMOR...29